

**MATRIKS RINCIAN PELAKSANAAN
STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

| NO | KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | SASARAN WAKTU | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|--|---|---------------|---|
| 1 | Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro Belum Berbadan Hukum | Persiapan pelaksanaan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro | <p>Pembentukan tim pelaksana Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro</p> <p>Permintaan data LKM yang belum berbadan hukum</p> | <p>Keputusan Menko Perekonomian</p> <p>Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati, Walikota mengenai pendataan LKM yang belum berbadan hukum dengan tembusan, kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri Keuangan - Meneg. Koperasi - Gubernur BI <p>Memorandum kantor Pusat Bank Indonesia kepada Kantor Bank Indonesia</p> <p>Data calon BUM Desa</p> | 2009 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
| | | Pendataan Lembaga Keuangan Mikro Belum Berbadan Hukum | <p>Pemberitahuan kepada Kantor Bank Indonesia tentang SKB</p> <p>Identifikasi LKM belum berbadan hukum yang akan menjadi BUM Desa</p> <p>Identifikasi dan edukasi LKM belum berbadan hukum yang akan menjadi Koperasi</p> <p>Identifikasi LKM belum berbadan hukum yang akan menjadi BPR</p> | <p>Data calon BUM Desa</p> <p>Data calon Koperasi baru</p> <p>Data calon BPR</p> | 2009 | <p>Bank Indonesia</p> <p>Departemen Dalam Negeri, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota</p> <p>Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota</p> <p>Bank Indonesia</p> |

| NO | KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | SASARAN WAKTU | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---|--|------------------------------|---|
| 2 | Kebijakan Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Belum Berbadan Hukum Menjadi Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, dan Bank Perkreditan Rakyat | Sosialisasi Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Akselerasi transformasi LKM belum berbadan hukum menjadi Badan Usaha Milik Desa Akselerasi transformasi LKM belum berbadan hukum menjadi Koperasi | Sosialisasi SKB 3 Menteri dan Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Penerbitan Peraturan mengenai transformasi LKM belum berbadan hukum menjadi BUM Desa Penerbitan keputusan Kepala Dinas yang membidangi KUKM untuk memperoleh bantuan teknis dan badan hukum Koperasi Fasilitasi penerbitan Badan Hukum Koperasi | Penjelasan pelaksanaan SKB 3 Menteri dan Gubernur Bank Indonesia ke departemen terkait, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/ Kota dan lintas pelaku lainnya Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan LKM menjadi BUM Desa Penerbitan SK Kepala Dinas yang membidangi KUKM Bantuan pembiayaan melalui APBD untuk pembentukan Koperasi Kepastian jangka waktu proses perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 2010 2010 2010 | Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Bank Indonesia Departemen Dalam Negeri, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota. Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota Bank Indonesia Departemen Dalam Negeri, Pemda Provinsi |
| 3 | Pembinaan dan Pendampingan bagi Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, dan BPR baru. | Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUM Desa | Bimbingan teknis dan fasilitasi manajemen BUM Desa bagi Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota Pendampingan manajemen BUM Desa | Aparat Pemda yang memiliki kemampuan teknis dalam fasilitasi dan pembinaan manajemen BUM Desa Kemampuan manajemen pengelola BUM Desa meningkat | 2010-2011 2010-2011 | Departemen Dalam Negeri, Pemda Provinsi Departemen Dalam Negeri, Pemda Kabupaten/Kota |

| NO | KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | SASARAN WAKTU | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|--|---|---------------|---|
| | | Penguatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi | Pelatihan teknis dan administrasi bagi aparat Dinas yang membidangi KUKM di tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan lembaga pendamping di bidang perkoperasian | Aparat Pemda yang memiliki pengetahuan tentang perkoperasian | 2010-2011 | Kementerian Negara Koperasi dan UKM |
| | | Penguatan permodalan Koperasi | Pendampingan teknis dan administrasi bagi Koperasi yang baru terbentuk | Pengurus Koperasi baru memiliki kemampuan manajemen perkoperasian | 2010-2011 | Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota |
| | | Penguatan permodalan Koperasi | Fasilitasi perkuatan permodalan koperasi yang baru terbentuk melalui dana bergulir, dukungan asuransi/ penjaminan, linkage program, dan penyertaan modal | Koperasi yang sehat dan handal | 2010-2011 | Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota |
| | | Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BPR | Penyempurnaan program kompetensi dan sertifikasi SDM BPR | Modul/kurikulum program kompetensi dan sertifikasi SDM BPR | 2010 | Bank Indonesia |
| | | | Pelaksanaan program sertifikasi pengurus Bank Perkreditan Rakyat | Pengurus BPR bersertifikasi | 2010 | Bank Indonesia |
| 4 | Peningkatan Pengawasan Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, dan BPR | Peningkatan pengawasan BUM Desa | Pembinaan dan Fasilitasi BUM Desa oleh Pemda Kabupaten/Kota | BUM Desa yang akuntable, partisipatif, dan transparan | 2010-2011 | Departemen Dalam Negeri, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota |
| | | Peningkatan pengawasan dan pengendalian koperasi | Sosialisasi dan peningkatan wasdai koperasi | Koperasi jasa keuangan yang sehat, kuat, dan tangguh | 2010-2011 | Kementerian Negara Koperasi dan UKM |
| | | Revitalisasi pengawasan BPR | Melakukan evaluasi hasil pengawasan Badan Kredit Desa oleh BRI | Hasil evaluasi | 2010 | Bank Indonesia |

| NO | KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | SASARAN WAKTU | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---|---|---------------|---|
| 5 | Pemantapan Perkembangan Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, dan Bank Perkreditan Rakyat | Peningkatan peran BPR dalam pengembangan ekonomi lokal | Penyusunan arah pengembangan BPR jangka menengah Memfasilitasi pendirian lembaga pemeringkat BPR | Cetak biru strategi pengembangan BPR Lembaga pemeringkat BPR | 2009 2010 | Bank Indonesia |
| | | Peningkatan peran Koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal | Penyusunan renstra pemda yang mendorong peningkatan peran Koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan Penyusunan arah pengembangan Koperasi Penyusunan sistem penilaian kinerja Koperasi | Rencana strategis pemerintah daerah yang memuat program pengembangan koperasi Rencana Pengembangan Koperasi Daftar Peringkat Koperasi | 2010 2010 | Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota Kementerian Negara Koperasi dan UKM Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten / Kota |
| | | Peningkatan peran BUM Desa dalam pengembangan ekonomi lokal | Penyusunan penilaian kinerja BUM Desa | Daftar Peringkat BUM Desa | 2010 | Departemen Dalam Negeri, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, |
| | | Evaluasi pelaksanaan Strategi Pengembangan -Lembaga Keuangan Mikro | Penilaian capaian pelaksanaan Keputusan Bersama 3 Menteri dan Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro | Rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro | 2011 | Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Bank Indonesia |